

Id : 16043

Call Number : 345.023 EFF A

Judul : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 3017/Pid.B/2008/Pn.Tng Dalam Perkara Korupsi Kantor Pos Tangerang / oleh Ronald Effendy

Pengarang : EFFENDY, RONALD

Nim : 205050021

Kota : Jakarta

Tahun Terbit : 2011

Deskripsi Fisik : viii, 121 hal. lamp. 27 cm

Pembimbing : 1.Andriawan, Dian

Bidang : 1.Hukum

Subjek : 1.Tindak pidana Korupsi

Abstrak : abstrak (A>Nama : RONALD EFFENDY NIM : 205050021 (B)Judul : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 3017/Pid.B/2008/Pn.Tng Dalam Perkara Korupsi Kantor Pos Tangerang (C)viii + 121 halaman + lampiran, 2011 (D)Kata kunci : Perkara Korupsi Kantor Pos Tangerang (E)Isi : Apakah putusan bebas oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 3017/Pid.B/2008/PN.TNG sudah sesuai dengan bagian inti delik korupsi dalam Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001? Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui sudah atau belum sesuai putusan bebas oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 3017/Pid.B/2008/PN.TNG dengan bagian inti delik korupsi dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Kegunaan penelitian dari segi teoritis yaitu sebagai pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya tentang tindak pidana korupsi. Sedangkan secara praktis diharapkan memberikan kegunaan bagi masyarakat untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi kalangan yang bertugas, baik yang menetapkan kebijaksanaan dan peraturan secara umum mengenai hukum pidana terutama mengenai tindak pidana korupsi, maupun bagi aparat petugas operasional yang menangani kasus tersebut. Putusan bebas yang diberikan oleh Hakim sudah sesuai, disebabkan salah satu bagian inti delik korupsi yaitu ?merugikan keuangan Negara? dianggap tidak terpenuhi karena

selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Pos Tangerang, terdapat kenaikan pendapatan yang cukup signifikan bagi Kantor Pos Tangerang. Kecuali dapat dibuktikan bahwa komisi yang disetujui pengeluarannya oleh terdakwa memang dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri dan/atau korporasi sehingga merugikan keuangan / perekonomian Negara sebagaimana disebutkan sebagai bagian inti delik korupsi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Sebaiknya diterapkan penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, dan para pihak (polisi, jaksa, hakim) yang memeriksa perkara dan mengadili perkara korupsi hendaknya bersikap adil dan bijaksana serta tidak memihak. (F) Daftar acuan : 18 (1967-2009) (G) Pembimbing : Dian, SH., MH. (H) Penulis : Ronald Effendy

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR.....i
DAFTAR ISI.....iv
ABSTRAK.....vii
DAFTAR SINGKATAN.....viii
BAB I PENDAHULUAN
A.Latar Belakang.....1
B.Permasalahan.....7
C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....7
D.Kerangka Konseptual.....8
E.Metode Penelitian.....10
F.Sistematika Penulisan.....12
BAB II LANDASAN TEORI
A.Tindak Pidana.....14
B.Korupsi.....17
C.Bentuk-bentuk Korupsi.....20
D.Tindak Pidana Korupsi.....27
E.Subjek Delik Korupsi.....28
F.Bagian Inti Delik Korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.....32
BAB III DATA HASIL PENELITIAN
A.Sejarah PT. Pos Indonesia.....49
B.Kebijakan PT. Pos Indonesia Untuk Pembinaan Eksternal.....50
C.Perjanjian Kerja Sama (PKS) PT. Pos Indonesia.....54
D.Kronologis Perkara.....56
E.Kronologis Persidangan.....64
F.Pertimbangan Hakim.....89
G.Putusan Pengadilan.....105
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN
A.Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Terdakwa Erinaldi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 3017/Pid.B/2008/PN.TNG.....106
B.Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 3017/Pid.B/2008/PN.TNG.....113
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan.....123
B. Saran.....124
DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP LAMPIRAN